

SURVEI PERSEPSI GENERASI MUDA TERHADAP INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI TAHUN 2017

Oleh:

Daru Purnomo

ABSTRACT

The future of Indonesia is determined by the quality of human resources, particularly among young people. In the context of dealing with the problem of corruption, which is systemic, we certainly hope that young children are relatively more sterile than the values of permissiveness toward corruption. Thus, when they enter into the adult world, began working at the company, or become businessmen, bureaucrats, politicians, and others, they have the value of a strong integrity and spearheading the eradication of corruption in their respective sectors. Active and visible role in the eradication of corruption of young people who have acute in this country, became a great hope to build a corruption-free nation Indonesia. Prerequisite for achieving corruption-free Indonesia is a strong lack of awareness about integrity as a foundation in their resistance to corruption.

This study aims to determine the perceptions of young people against the integrity and anti-corruption that can be assessed through (1) the understanding and knowledge of integrity, (2) values, principles and attitudes when dealing with corrupt behavior, (3) permissiveness when confronted with corrupt behavior, and (4) the role of the younger generation in an effort to prevent corruption. This study uses a quantitative approach and the type of research that is used to collect data is to survey.

The results showed that the level of understanding and knowledge of integrity among the young generation is quite good, they recognize well about the values and principles of integrity. But on the other hand there is a tendency to compromise and negotiate and permissiveness towards the values and principles of integrity when confronted situational conditions that pertained to him and his family. There is a tendency pessimistic attitude in the young generation of the role and commitment in building integrity and anti-corruption.

Keywords: Perception, Youths, Integrity, Anti-corruption

1. PENDAHULUAN

Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan anak muda. Dalam konteks menghadapi problem korupsi yang sudah bersifat sistemik, kita tentunya berharap agar anak muda relatif lebih steril dari nilai-nilai yang permisif terhadap korupsi. Dengan demikian, pada saat mereka masuk ke dunia orang dewasa, mulai bekerja di perusahaan, atau menjadi pengusaha, birokrat, politisi, dan lain-lain, mereka memiliki nilai integritas yang kuat dan menjadi ujung tombak bagi pemberantasan korupsi di sektornya masing-masing.

Integritas individu berkaitan erat dengan integritas publik, bukan hanya karena integritas publik ditentukan oleh integritas individu-individu yang ada di dalamnya, namun harus dilihat juga bahwa integritas seseorang tidak cukup dibentuk dengan pengetahuan semata, namun juga harus ditempa dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah lingkungan sosial yang juga berintegritas. Artinya, integritas dan kesadaran antikorupsi harus dilandasi oleh hasrat untuk mencapai kemaslahatan bersama (*public goods*).

Integritas anak muda sebagai individu dapat dilihat dari sejauh mana pemahaman dan sikap dia terhadap isu/tindakan tertentu yang berkaitan dengan integritas. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana permisivitas anak muda yang bersangkutan terhadap tindakan yang bertentangan dengan integritas, baik permisivitas atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain di sekitarnya, maupun “kesediaan” dirinya untuk melakukan tindakan tersebut. Apabila kita berhenti sampai di sini, tentunya kita akan luput melihat aspek integritas publik yang secara resiprokal bekerja membentuk integritas individu.

Program untuk melibatkan anak muda dalam pemberantasan korupsi melalui penguatan nilai integritas sudah dimulai oleh *Transparency International* (TI) melalui “*Global Youth Integrity Programme*”. Di beberapa negara, seperti Namibia, Korea Selatan, Vietnam, Hungaria dan Indonesia, sudah pula dilakukan Survei Integritas Anak Muda (*Youth Integrity Survey*). Riset

dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh *base line survey* yang dapat dijadikan dasar bagi penyusunan program dan perumusan kebijakan antikorupsi bagi anak muda.

Survei Integritas Anak Muda yang diselenggarakan oleh *Transparency International* Indonesia (TI-Indonesia) pada tahun 2012 telah mencoba untuk melihat pandangan anak muda di Jakarta tentang integritas dan antikorupsi. Pada tahun 2013, *Transparency International* Indonesia kembali mengadakan Survei yang sama yang difokuskan pada anak muda di Kota Besar (Ibu Kota Provinsi) di luar Jakarta dan di luar Pulau Jawa. Tiga wilayah tersebut adalah Aceh, Kupang dan Surabaya.

Selain *survey* yang dilakukan *Transparency International*, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 16 – 22 Agustus 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap praktek korupsi sebagai sebuah bentuk kewajaran. Dari *survey* tersebut ditanyakan pandangan responden terkait pemberian uang atau barang untuk memperlancar suatu proses ketika berhubungan dengan instansi pemerintah. Hasilnya menyatakan bahwa 63.2 persen responden menganggap sikap tidak wajar, namun ada 30.40 persen responden menyatakan bahwa sikap itu merupakan sesuatu yang wajar. Ini tentunya merupakan gambaran yang buruk dan menyedihkan karena 3 dari 10 warga Indonesia menganggap korupsi wajar. Bahkan lebih memprihatinkan lagi hasil *survey* tentang Persepsi dan Pengalaman Masyarakat Terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh *Center for Strategig and International Studies* (CSIS) ditemukan bahwa 33.3 persen orang Indonesia bergelar doctor atau selevelnya menganggap korupsi suatu bentuk kewajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai dan prinsip hidup masyarakat mulai terdegradasi yang disebabkan karena gaya hidup dan gaya berfikir yang praktis, yang mengindikasikan bahwa mereka/masyarakat tidak mau repot dalam mengurus sesuatu.

Gambaran tentang korupsi ini menunjukkan bahwa fenomena korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan bahkan structural, hal ini merupakan problem

sosial-budaya dan politik yang mengakar dan menggurita. Anak muda adalah bagian dari suatu generasi dalam masyarakat yang hidup di Negara tercinta Indonesia. Bagaimana sikap dan perilaku integritas mereka akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka berinteraksi dan bersosialisasi baik itu keluarga, pertemanan, kampus, media sosial, dan pengalaman hidup sehari-hari. Dalam kondisi system yang korup, tentunya tidak mudah bagi anak muda Indonesia yang diperhadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan ini. Kesalahan dalam penanganan bisa mengakibatkan terjadinya proses pewarisan generasi yang korup pula. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Survei Persepsi Generasi Muda terhadap Nilai Integritas dan Anti Korupsi perlu dilakukan. Hasil dari Survei ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi proses perumusan kebijakan anti korupsi terutama berkaitan dengan pelbatan peran generasi muda di Kota Salatiga. Oleh karena itu, survei Persepsi Anak Muda Terhadap Integritas dan Sikap Anti Korupsi dilakukan untuk memberi gambaran faktual tentang kondisi integritas dan sikap anti korupsi di kalangan anak muda. Kemudian hasil penelitian ini juga duimaksudkan untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada para pihak untuk mengatasi problem integritas dan mengembangkan sikap anti korupsi di kalangan anak muda.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Integritas

Integritas dapat didefinisikan sebagai standard kompetensi, keadilan dan kejujuran yang tertinggi. Dalam arti yang lebih luas, integritas mencakup soal keadilan, tingkah laku, kebenaran, dan kesetaraan (Klockars, Ivkovic dan Haberfeld, 2006). Cara yang sering kali digunakan dalam melihat integritas adalah dengan merumuskannya secara negatif, dengan memberikan contoh-contoh sikap atau tindakan yang melanggar integritas. Sikap atau tindakan yang melanggar integritas tersebut antara lain: korupsi, kolusi, penipuan, pencurian sumber daya, konflik kepentingan dalam pelayanan publik, dll.

Dalam tradisi filsafat moral dan etika, integritas dimasukkan ke dalam kategori apa yang disebut *virtue* atau yang di Indonesia umumnya diterjemahkan menjadi “keutamaan”. Istilah ini sudah diperkenalkan Aristototeles dan tradisi republikan, yang dimaknai sebagai, “*citizens’ involvement in self-rule guided by devotion to the public good*”, atau juga kadang dimaknai sebagai “*moral excellence*” yang akan menghasilkan “*the human good*”. *Virtue* atau keutamaan hanya bisa dibangun dan ditempa melalui tindakan sehari-hari sekaligus pendidikan yang memadai dalam suatu lingkungan yang membentuk individu dengan habitus berintegritas. Aristoteles percaya bahwa pendidikan dan latihan dapat membentuk dan menanamkan *virtue*. Namun banyak yang menilai bahwa itu saja tidak cukup, *virtue* atau keutamaan berkembang bersama sifat-sifat seseorang sebagai habitus, yakni melalui pendidikan dan pembiasaan melakukan yang baik. Karenanya, lingkungan sosial, seperti keluarga, pendidikan atau tempat bekerja dan berkegiatan, juga ikut menentukan. Jadi keutamaan bukan semata-mata diperoleh melalui pengetahuan, meskipun itu sangat diperlukan, namun juga terutama dari kebiasaan melakukan hal-hal yang baik dan bertanggungjawab.

Etimologi kata integritas sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti “tidak rusak, murni, utuh, jujur, lurus, dan dapat dipercaya atau diandalkan”. Studi dan riset Haryatmoko, *Etika Publik* (2011), menelusuri dan menguraikan dengan panjang lebar mengenai etika publik dan integritas publik sebagai satu keterkaitan yang koheren, dengan secara khusus memfokuskan perhatian risetnya pada pejabat publik dan politisi. Namun integritas publik tidak bisa dilepaskan dari integritas individu, karena integritas individu sangat menentukan pembentukan integritas publik. Integritas individu dapat diuji sebagai integritas publik pada saat berhasil memegang teguh janji untuk mentaati hukum, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh jabatan, dan arah arah kebijakannya tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, integritas merupakan bentuk habitus. Yang dimaksud habitus di sini merujuk pada pemikiran Pierre

Bourdieu, yakni “prinsip generatif dari tindakan praktis tertentu yang berbeda”, misalnya apa yang dimakan oleh seorang buruh, khususnya bagaimana cara dia makan, olahraga yang ia lakukan dan bagaimana ia melakukannya, pandangan politiknya dan bagaimana cara dia mengekspresikannya berbeda secara sistematis dengan aktivitas pemilik industri secara korespondens. Jadi pendidikan dan pembiasaan menjadi modal pokok pembentukan integritas. Keluarga, sekolah dan lingkungan pergaulan sangat menentukan dalam membentuk integritas seseorang atau individu. Dari lingkungan sosial itu integritas seseorang sebagai habitus terbentuk. Dari sini bisa ditarik suatu penyimpulan sederhana bahwa membentuk integritas sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang kondusif untuk membentuk habitus keutamaan dan integritas. Pendidikan yang menentukan pembentukan habitus umumnya ditularkan tanpa melalui bahasa langsung ataupun kesadaran, melainkan melalui ajakan yang tertanam lewat segi-segi yang yang kelihatannya tidak tertera, yakni keadaan dan praktik yang sangat biasa.

Transparency International mendefinisikan integritas dengan: *“behaviours and actions, consistent with a set of moral and ethical principles and standards, embraced by individuals as well as institutions, that create a barrier to corruption”*. Konsep integritas tersebut memiliki 4 (empat) dimensi:

- Moral dan etika: pemahaman konseptual akan perilaku yang pantas;
- Prinsip: kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah;
- Patuh pada hukum: tingkat kepatuhan pada kerangka legal yang ditetapkan di masyarakat;
- Resistensi pada korupsi: kemampuan untuk mengubah praktik korupsi.

2.2 Variabel Yang Di Ukur

Variabel survei adalah gejala yang hendak diketahui perbedaannya (variasinya) pada suatu populasi. Variabel survei akan digali melalui sejumlah pilihan yang memerlukan tanggapan dari responden. Pilihan tersebut dapat berupa menjawab pertanyaan atau mengevaluasi suatu pernyataan, dan

memilih pilihan jawaban yang ada. Sejumlah variabel yang hendak diketahui gambarannya pada populasi anak muda dalam survei ini adalah: (1) Pemahaman tentang Integritas (Pemahaman tentang Ciri-ciri dari Integritas dan Nilai dan prinsip yang diyakini/nilai integritas responden), (2) Permisifitas Individu, (3) Pengalaman akan situasi korupsi, (4) Permisivitas Lingkungan Sosial, (5) Pengetahuan akan integritas dan anti korupsi (Pelajaran tentang Anti Korupsi, Informasi yang diperoleh tentang Anti Korupsi, Lingkungan Sosial yang memberikan informasi tentang Anti Korupsi, Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh informasi/Cara memperoleh informasi), (6) Peran anak muda dalam Mengembangkan Nilai Integritas dan Sikap Anti Korupsi, (7) Nilai Integritas Individu (responden) dan (8) Komitmen dalam Membangun Integritas dan Anti Korupsi

Selanjutnya Survei Persepsi Generasi Muda terhadap Integritas dan Anti Korupsi membagi pembahasan menjadi 8 (delapan) bagian selaras dengan variabel tersebut diatas.¹

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam pendekatan ini, teorisasi bukanlah merupakan hal yang mutlak dalam penelitian, namun demikian pemahaman terhadap teori tetap diperlukan untuk membantu proses penelitian di lapangan (Bungin, 2007:25). Kemudian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan *survey*. *Survey* dilakukan di 14 fakultas² yang ada di Universitas Kristen Satya Wacana.

¹Parameter ini digunakan oleh Tranparansi International dalam Survei Persepsi Anak Muda terhadap Integritas dan Sikap Anti Korupsi pada Tahun 2011 (DKI Jakarta) dan pada Tahun 2013 (Banda Aceh, Prov NAD). (Kupang, prov NTT), dan (Surabaya, Prov Jawa Timur), dan telah disesuaikan dengan tujuan dan substansi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga

²Mahasiswa angkatan 2014-2017

Penelitian ini dilakukan dengan model *sampling* dan menggunakan taraf signifikansi 5%. Model *sampling* digunakan karena jumlah keseluruhan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana tidak mampu dijangkau seluruhnya oleh peneliti³, dan pertimbangan efisiensi tenaga dan biaya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 390⁴ dari 14 fakultas yang ada. Teknik yang digunakan adalah ***disproportionale kuota random sampling***. Analisis Data dilakukan dengan analisis kuantitatif menggunakan tahapan koding dan tabulasi, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan hasil Survei Persepsi Generasi Muda terhadap Nilai Integritas dan Anti Korupsi. Penejelasan hasil *survey* ini untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Uraian pada bagian ini didasarkan pada focus penelitian yang meliputi variable-variabel seperti: (1) pemahaman tentang ciri integritas, (2) Pemahaman tentang Nilai dan prinsip yang diyakini terkait dengan perilaku koruptif, (3) Permisivitas individu terkait perilaku koruptif, (4) Pengalaman dengan korupsi, (5) permisifitas lingkungan sosial, (6) pengetahuan akan integritas dan anti korupsi, (7) Peran anak muda dalam upaya mengembangkan integritas dan sikap anti korupsi, (8) Sikap integritas, dan (9) Komitmen dalam membangun integritas dan anti korupsi. Variabel-variabel tersebut kemudian dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan dari padanya akan diperoleh suatu data yang kemudian dilakukan suatu analisis sehingga diharapkan mampu menjawab persoalan dan tujuan penelitian ini.

Responden atau unit amatan dalam penelitian ini adalah generasi muda (mahasiswa) yang ada di Kota Salatiga. Dalam *survey* ini dipilih mahasiswa UKSW sebagai locus pengambilan data. Alasan memilih anak muda (mahasiswa)

³Jumlah mahasiswa UKSW saat ini adalah 17.348

⁴Di dapatkan dengan menggunakan rumus Slovin dan taraf signifikansi 5%

karena masa depan bangsa akan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia, khususnya dikalangan anak muda. Generasi masa depan ini diharapkan memiliki nilai integritas yang kuat dan menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi.

Berikut analisis ringkas terkait hasil *survey* persepsi anak muda terhadap nilai integritas an anti korupsi. Dalam analisis ini untuk mendukung penjelasan terhadap data maka akan disertakan tabel dan grafik. Diharapkan melalui penyajian data ini akan mempermudah dalam memahami temuan-temuan hasil penelitian.

4.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian jumlah responden laki-laki maupun perempuan hampir berimbang yaitu laki-laki sebanyak 196 responden dan perempuan adalah 196 responden. Hal ini tidak menjadi persoalan karena memang fokus dalam penelitian bukan tentang jenis kelamin responden.

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Asal Daerah Responden

No	Asal Daerah	Frekuensi	Persentase
1	Jawa Tengah	216	55.4
2	Papua Barat	3	.8
3	Papua	1	.3
4	Kalimantan Tengah	7	1.8
5	Kalimantan Timur	3	.8
6	Bali	3	.8
7	Maluku	5	1.3
8	Jawa Timur	10	2.6
9	Kalimantan Selatan	1	.3
10	Sumatera Barat	2	.5
11	DIY	1	.3
12	Jawa Barat	21	5.4
13	NTT	10	2.6
14	Maluku	9	2.3
15	Maluku Tenggara	1	.3
16	Kalimantan Barat	12	3.1
17	Kalimantan Utara	3	.8

18	Sulawesi Tengah	2	.5
19	Bangka Belitung	1	.3
20	Sumatra Barat	1	.3
21	Daerah Istimewa Aceh	1	.3
22	DKI Jakarta	3	.8
23	Papua	5	1.3
24	Lampung	15	3.8
25	Sulawesi Utara	14	3.6
26	Riau	11	2.8
27	Sulawesi Selatan	14	3.6
28	Maluku Utara	6	1.5
29	Sumatera Utara	9	2.3
	Total	390	100.0

Sumber : Analisis Data Olahan Spss, Tahun 2017

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari Jawa Tengah yaitu 55,4%, hal ini dimungkinkan karena memang Universitas Kristen Satya Wacana terletak di Kota Salatiga yang dari segi akses sangat mudah di jangkau. Tidak heran jika sebagian besar mahasiswanya berasal dari Jawa Tengah. Namun, dalam hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Universitas Kristen Satya Wacana bisa dikatakan sebagai Indonesia Mini karena mahasiswa yang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana berasal dari ujung barat hingga ujung Timur Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Universitas Kristen Satya Wacana menjadi lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian integritas dan anti korupsi dikarenakan sudah mewakili seluruh daerah di Indonesia.

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Asal Suku Responden

No	Asal Suku Responden	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Ada Jawaban	4	1.0
2	Jawa	213	54.6
3	Sunda	2	.5
4	Batak	27	6.9
5	Betawi	3	.8
6	Melayu	1	.3
7	Tionghoa	44	11.3
8	Dayak	15	3.8
9	Sumba	3	.8
10	Minahasa	18	4.6
11	Toraja	11	2.8

12	Timor	10	2.6
13	Ambon	23	5.9
14	Papua	6	1.5
15	Sangir	3	.8
16	Lampung	1	.3
17	Loloda	2	.5
18	Bali	2	.5
19	India	2	.5
	Total	390	100.0

Sumber : Analisis Data Olahan Spss, Tahun 2017

Berdasarkan hasil penelitian meunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki asal suku Jawa yaitu 213 responden. Kemudian diikuti dengan etnis tionghoa yang berjumlah 44 responden, hal ini menunjukkan bahwa Universitas Kristen Satya Wacana sangat beragam dari segi suku bahkan ada 2 mahasiswa yang merupakan keturunan India.

Karakteristik responden tersebut memeberikan suatu gambaran tentang keanekaragaman aspek suku/etnis, agama, ras, golongan, dan bahkan latar belakang sosial-ekonomi responden. Gambaran ini merujuk kondisi riil bangsa Indonesia yang beragam dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.

4.2 Karakteristik Variabel

4.2.1 Pemahaman Tentang Ciri Integritas.

Dalam survey ini untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman responden tentang integritas, ditandai oleh tujuh sikap sebagai ciri integritas, yaitu:

1. Tidak pernah berbohong, tidak pernah curang, dan dapat dipercaya
2. Tidak berbohong atau berbuat curang KECUALI jika menghadapi situasi sulit bagi dirinya atau keluarganya
3. Tidak pernah melanggar hukum (selalu mengikuti aturan negara)

4. Menunjukkan solidaritas dan dukungan bagi keluarga dan teman-teman dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum
5. Tidak melakukan korupsi (tidak menerima atau memberi suap) dalam kondisi apapun
6. Menolak perilaku korupsi kecuali jika jumlahnya tidak seberapa (jumlah uang yang kecil atau hadiah sederhana)
7. Menolak perilaku korupsi kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit

Ketika responden diajukan pertanyaan/ Pernyataan yang mewakili ciri integritas, dengan rentang pilihan jawaban “Tidak tahu Setuju” (skor 1 – 3), dan untuk memudahkan dalam memahami ciri integritas responden, maka dibagi menjadi tiga kategori mulai dari: rendah – sedang – tinggi. Semakin banyak responden mengenali ciri integritas, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan pengetahuan responden tentang ciri integritas.

Berikut adalah gambaran tingkat pemahaman integritas, Dari tabel nampak bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman dalam kategori sedang (62.3 %) dan tinggi (10.5%). Namun demikian masih ada sekitar 27.2% mereka memiliki tingkat pemahaman integritas yang rendah. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian serius terkait dengan lemahnya pemahaman generasi muda terkait dengan nilai integritas, yang seharusnya pada tingkat kognitif mereka pahami. Ketidaktahuan pemahaman tingkat kognitif akan berdampak pada terbentuknya sikap integritas dan tindakan yang mencerminkan nilai integritas.

Tabel 3 Tingkat Pemahaman Ciri Integritas Pada Mahasiswa Tahun 2017

No.	Tingkat Pemahaman	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	41	10.50
2	Sedang	243	62.30
3	Rendah	106	27.20

	Total	390	100.00
--	-------	-----	--------

Sumber : Analisis Data Olahan Spss, Tahun 2017

Tingkat pemahaman ciri integritas dengan pernyataan sikap sebagai indikatornya, dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu Tingkat Pemahaman Ciri Integritas pada wilayah yang “Tegas” dan wilayah “Abu-abu”.

Tabel 4 Tingkat Persetujuan Responden Terhadap Ciri Integritas yang “Tegas”

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah berbohong, tidak pernah curang, dan dapat dipercaya	248	63.60
3	Tidak pernah melanggar hukum (selalu mengikuti aturan negara)	246	63.1
5	Tidak melakukan korupsi (tidak menerima atau memberi suap) dalam kondisi apapun	352	90.5
	Total	390	100.00

Sumber : Analisis Data Olahan Spss, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4 mayoritas responden mengenali prinsip integritas melalui perilaku jujur, taat hukum dan tidak korupsi. Artinya responden cukup paham terkait dengan ciri integritas, hal ini ditunjukkan dari jumlah prosentase untuk masing-masing penciri integritas di atas 60 persen, bahkan terkait dengan pernyataan “tidak melakukan korupsi dalam kondisi apapun” memiliki prosentase yang tinggi yakni sebesar 90.5% .

Namun demikian sikap mengkompromikan integritas juga bisa dilihat dari pernyataan responden terkait dengan ciri integritas yang “Abu-Abu”.

Tabel 5 Tingkat Persetujuan Responden Terhadap Ciri Integritas yang “Abu-Abu”

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
2	Tidak berbohong atau berbuat curang KECUALI jika menghadapi situasi sulit bagidirinya atau keluarganya	219	56.20

4	Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi keluarga dan teman-teman dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum	165	42.30
6	Menolak perilaku korupsi kecuali jika jumlahnya tidak seberapa (jumlah uang yang kecil atau hadiah sederhana)	120	30.80
7	Menolak perilaku korupsi kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit	129	33.10
	Total	390	100.0

Sumber : Analisis Data Olahan Spss, Tahun 2017

Dari tabel 5 nampak sikap kompromitas integritas yang paling banyak dipilih responden adalah sikap ambigu terkait dengan kejujuran yang sifatnya situasional (56.20 %). Demikian pula terkait dengan masalah pelanggaran hukum, responden cenderung mengkompromikan integritas apabila berkaitan dengan kelompoknya (eksklusivitas).

4.2.2. Nilai dan Prinsip yang Diyakini

Adalah wajar apabila setiap orang berharap atau punya keinginan untuk sukses, memiliki pendapatan yang tinggi, dan kaya. Namun keinginan untuk menjadi seperti itu sering berpotensi membuat orang menghalalkan dengan segala cara. Bagaimana seseorang bisa mewujudkannya akan sangat tergantung dari nilai-nilai dan prinsip hidup yang diyakininya.

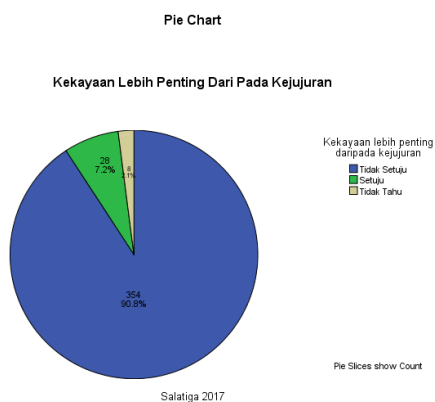
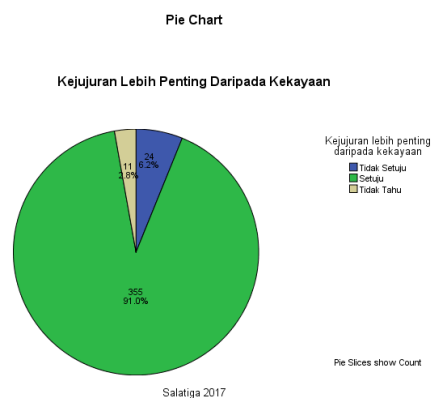
Tabel dan grafik berikut memberikan suatu gambaran dimana responden memiliki nilai-nilai dan prinsip hidup dalam mewujudkan harapan yang diinginkannya. Dari hasil survey menunjukkan mayoritas Responden lebih mengedepankan nilai integritas dalam mewujudkan keinginan untuk menjadi kaya, sukses dan peningkatan pendapatan keluarga. Namun persentase jawaban responden jika diperhadapkan antara integritas dan peningkatan pendapatan keluarga, cenderung lebih rendah (mengkompromikan nilai dan prinsip hidup demi peningkatan pendapatan keluarga) jika dibandingkan dengan pernyataan yang terkait dengan kekayaan dan kesuksesan.

Tabel 6 Kekayaan dan Integritas

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Setuju	354	90.80
2	Setuju	28	7.20
3	Tidak Tahu	8	2.10
Total		390	100.00

Sumber : Analisis Data Olahan Spss, Tahun 2017

Pada diagram 3, ketika responden disodorkan pada suatu pernyataan bahwa “kekayaan lebih penting dari pada kejujuran” , maka sebagian besar (90,8%) mereka menjawab tidak setuju, ini mengindikasikan bahwa mereka masih mengedepankan dan memegang teguh nilai integritas dalam mencari dan mengusahakan kekayaan. Namun demikian ada sekitar 7,2% yang menjawab setuju, bahkan ada yang tidak tahu.

**Diagram 3****Diagram 4**

Sejalan dengan diagram 3, maka pada diagram 4 ketika disodorkan suatu pernyataan bahwa “kejujuran lebih penting dari pada kekayaan”.. mereka sebagian besar menyatakan setuju (91%). Dan mereka yang tidak setuju maupun tidak tahu tetap menunjukkan konsistensi jawaban seperti ditunjukkan pada diagram sebelumnya. Kondisi ini juga sejalan dengan diagram 6, dimana generasi muda masih meyakini bahwa kejujuran dan integritas akan menghasilkan kekayaan.

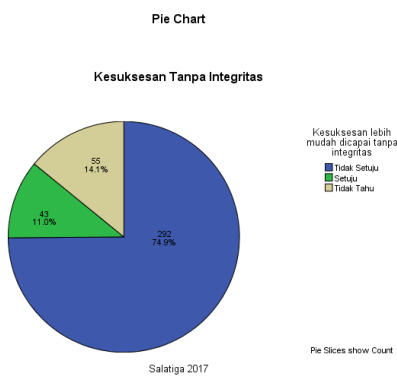


Diagram 5

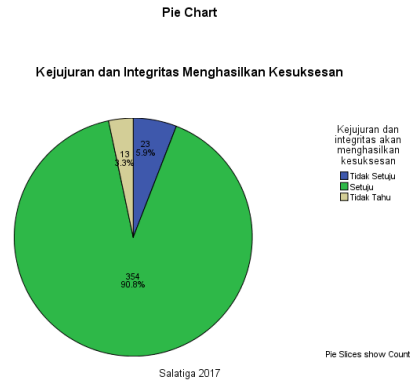


Diagram 6

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapat Bahwa Kejujuran dan Integritas Menghasilkan Kesuksesan

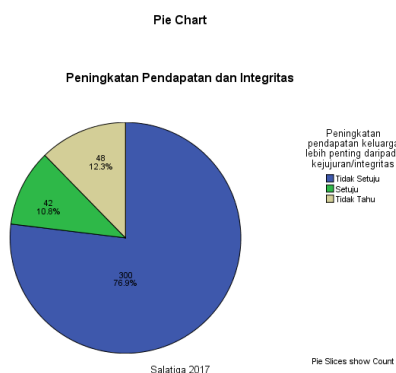


Diagram 7

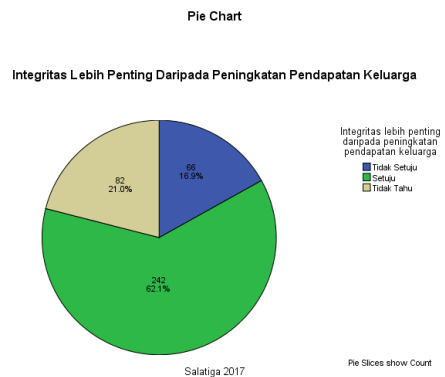


Diagram 8

Sumber : Analisis Data Olahan Spss, Tahun 2017

Konsistensi dalam memegang nilai-nilai integritas berkaitan dengan kekayaan, kejujuran dan kesuksesan, ternyata mengalami perubahan yang cenderung berada di wilayah abu-abu atau dengan kata lain mereka menkompromikan nilai-nilai integritas jika diperhadapkan pada peningkatan pendapatan keluarga. Artinya nilai-nilai integritas cenderung dikompromikan jika diperhadapkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pendapatan

keluarga. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan jika diperhadapkan pada gerakan pemberantasan korupsi, karena nilai dan prinsip integritas pada setiap individu merupakan modal dasar dalam pemberantasan korupsi.

4.2.3 Permisivitas Individu

Permisivitas dipahami sebagai penerimaan terhadap tindakan yang tidak berintegritas. Dalam survey ini responden anak muda ditanyakan **seberapa jauh mereka dapat menerima suatu pelanggaran nilai etis tertentu, misalnya: jika ada seseorang yang melanggar hukum demi menolong keluarganya atau memberi uang tambahan kepada petugas supaya dapat pelayanan kesehatan yang baik.**

Ketika nilai integritas ada pada wilayah abu-abu, maka ada kecenderungan seseorang /individu menjadi permisif didalam mensikapi suatu keadaan. Walaupun sebagian besar responden mendukung nilai integritas/kejujuran dan ketaatan pada hukum yang tidak dapat dikorbankan demi mencapai kesuksesan dan kekayaan (lihat tabel 6). Namun dalam praktek sering nilai-nilai tersebut bertabrakan dengan kepentingan atau kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan orang menjadi permisif pada aturan. Pada umumnya sikap permisif muncul apabila responden diperhadapkan pada situasi yang menyangkut pribadi maupun kelompoknya, sehingga dalam setiap pernyataan yang diberikan kepada responden akan selalu ada jawaban yang “ambigu”. Responden /anak muda di satu sisi memiliki pemahaman yang tinggi terhadap nilai-nilai integritas, kejujuran, dan ketaatan pada hukum, namun mereka tidak juga tidak ragu untuk mengkompromikannya. Sikap permisif itu nampak/muncul ketika berkaitan dengan pelanggaran hukum demi menolong keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman korupsi yang rendah (sedikit) yaitu sebesar 87,2% , hal ini menjadi aneh padahal mereka sejujurnya sangat dekat dengan hal ini. Misalnya adalah korupsi waktu, pada saat kuliah mahasiswa seringkali

korupsi waktu. Namun, hal ini bisa dipahami bahwa konteks korupsi yang dipahami dalam penelitian ini adalah korupsi di sektor-sektor publik. Sektor publik yang dimaksud adalah terkait pengelolaan dokumen, suap pada saat ujian, suap di puskesmas, suap pada saat ditilang polisi, suap untuk mendapatkan pekerjaan, dan suap untuk bisnis. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden tidak setuju dengan model nepotisme seperti ini, namun dalam konteks menyuap polisi ada 20,8% responden menyatakan setuju. Hal ini terjadi bisa jadi karena citra buruk polisi saat ini yang mudah di suap sehingga untuk lepas dari tilang mahasiswa cenderung berpikir pragmatis. Kemudian untuk mendapatkan pekerjaan ada 13,1 % responden menyatakan setuju untuk melakukan nepotisme. Hal ini dimungkinkan karena saat ini mencari pekerjaan adalah bukan hal yang mudah, saat ini untuk mendapatkan pekerjaan channel jauh lebih berpengaruh daripada kemampuan. Bahkan, isu yang berkembang di masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS kita harus memberikan mahar sebesar kurang lebih Rp 150.000.000,00 . Hal inilah yang bisa jadi menjadi alasan para mahasiswa berpikir pragmatis untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian nampak bahwa nepotisme menjadi hal yang wajar bagi para responden. Namun, justru menjadi menarik ketika berdasarkan pengolahan data para responden mengalami pengalaman yang rendah dengan korupsi. Memang masih jumlah responden yang menyatakan tidak setuju dengan nepotisme sangat besar, namun para responden yang menjawab setuju inilah yang akan sangat menarik untuk ditanyai lebih lanjut apa penyebab ia mewajarkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan nilai integritas. Kemudian hal lain yang menarik adalah masih ada responden yang menjawab tidak tahu terhadap kasus-kasus nepotisme tersebut, walaupun jumlahnya sangat kecil namun hal ini yang juga perlu ditelusuri lebih jauh apakah responden tersebut benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu terhadap persoalan ini.

4.2.4 Permisifitas Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat permisivitas para responden sangat tinggi yaitu sebesar 81,5%. Bisa dikatakan bahwa para responden sangat cuek terhadap berbagai kasus korupsi dan nepotisme yang ada di sekelilingnya. Hal ini sejalan dengan berbagai jawaban yang mereka berikan dalam kasus-kasus tertentu misalnya dalam hal pelayanan 103nomal mereka menyatakan tidak pernah mengalami pungutan liar yaitu sebesar 92,6%, namun ada 7,4% yang mengalami. Tidak heran apabila memang para responden sangat apatis dengan persoalan-persoalan terkait korupsi dan nepotisme hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak mengalami hal tersebut. Namun, ada 15 responden masih peka terhadap kasus-kasus seperti ini hal ini mungkin terjadi karena memang mereka pernah mengalami hal-hal yang dinyatakan diatas. Selain itu, mereka yang peka terhadap persoalan ini biasanya cenderung akan sangat kritis dalam menghadapi situasi-situasi anomaly, sebagai contoh adalah ketika mereka ditilang atau ada pungli mereka tidak akan memberikan uang, namun mereka akan coba berargumentasi serta membayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian mereka juga bersikap tidak apatis dengan hal ini, dan biasanya mereka lebih cerdik daripada petugas-petugas yang nakal tersebut.

4.2.5. Peran Generasi Muda Dalam Upaya Mengembangkan Integritas dan Anti Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 388 responden menyatakan setuju bahwa Generasi Muda mempunyai peran dalam upaya pemberantasan korupsi dan membangun nilai integritas. Artinya pihak pemerintah juga harus memberikan ruang yang cukup bagi para gennerasi muda untuk menjalankan hal ini. Namun, para responden juga memberikan beberapa alasan mengapa pemuda harus terlibat. Sebanyak 158 responden atau 40,51% menyatakan bahwa pemuda memiliki kewajiban sebagai penerus bangsa sehingga pemuda harus selalu terlibat dalam pemberantasan korupsi dan membangun nilai integritas. Namun, ada 5 responden yang menyataka

bahwa generasi muda belum terpengaruh korupsi. Hal ini bisa jadi benar asalkan sistem pendidikan yang dibangun menjunjung tinggi kejujuran dan menjunjung nilai pancasila. Kemudian 8,71% responden menyatakan bahwa mental dan moral generasi muda di latih sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan generasi muda untuk membuat inovasi pendidikan antikorupsi bagi generasi milenial. Metode pembelajaran konvensional nampaknya sudah tidak menarik lagi bagi generasi milenial, sehingga diperlukan inovasi pembelajaran agar generasi milenial memahami benar tentang bahaya korupsi. Kemudian sisi lain yang menarik adalah ada 2 responden yang menyatakan bahwa dengan melibatkan generasi muda Indonesia akan lebih maju. Hal ini seperti sebuah pernyataan Bung Karno “ berikan aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia” . Memang benar bahwa generasi muda memang menjadi ujung tombak Indonesia ke depan, Indonesia akan maju dalam berbagai hal asalkan tidak ada korupsi dan pemimpinnya selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sosok pemimpin muda yang berintegritas untuk memajukan bangsa dan bersaing di era global saat ini.

4.2.6. Sikap Integritas

Upaya untuk mempertahankan nilai dan prinsip sering kali mengalami dilema ketika ia dihadapkan pada nilai guna bagi si pelaku. Ketika responden diajukan suatu pertanyaan kasus ada tawaran kesempatan masuk sekolah/ kampus/ pekerjaan dengan mudah tanpa melalui proses seleksi (nepotisme), sebagian besar responden menyatakan menolak baik secara halus maupun tegas terhadap praktek nepotisme (33.8%), hal ini menunjukkan bahwa nilai integritas tetap dijunjung tinggi walaupun ada tawaran yang menguntungkannya. Namun tidak kalah besar pula sebagian responden cenderung mengkompromikan nilai integritasnya dengan menerima nepotisme jika dianggapnya menguntungkan (31.6%).

Masih berkaitan dengan sikap integritas, responden diajukan pada pertanyaan kasus tentang kesempatan kerja dengan menggunakan peluang kedekatan keluarga, hasil penelitian menunjukkan hampir separoh dari

responden (48.5%) setuju dengan praktik nepotisme demi memperoleh pekerjaan.

4.2.7. Komitmen Dalam Membangun Integritas dan Anti Korupsi

Ketidakjujuran dan berbagai sikap tidak etis sering terjadi karena adanya pembiaran. Perilaku tidak pantas yang tidak mendapatkan sanksi cenderung berulang. Efek jera diharapkan dapat mencegah perilaku yang sama berulang kembali. Oleh karenanya, selain kemauan pribadi untuk bersikap jujur, perlu juga melakukan suatu tindakan agar pelanggaran tidak terulang kembali. Komitmen untuk membangun integritas dan anti korupsi di kalangan mahasiswa ternyata tidak linier dengan kesadaran atau pemahaman mengenai dampak korupsi maupun kesadaran tentang peran anak muda dalam pemberantasan korupsi. Hal ini nampak dari hasil survey sebagai berikut,

Ketika ditanyakan **apakah responden siap melaporkan atau membuat pengaduan jika dihadapkan dengan perilaku korupsi dan tindakan yang tidak berintegritas**, menunjukkan bahwa 52.1% responden akan melakukan pengaduan jika hal itu terjadi, sementara mereka yang pernah melakukan pengaduan ada 9.2%, sedangkan yang lainnya **menyatakan baru melakukan pengaduan tergantung kasusnya (36.9%)** bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan pengaduan (7%).

Alasan tidak melakukan pengaduan terhadap perilaku korupsi. Ketika ditanyakan alasan responden tidak melapor/ melakukan pengaduan terhadap tindak perilaku korupsi, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan mengapa responden memilih tidak melakukan pengaduan. Beberapa diantaranya adalah merasa takut akan bahaya yang mengancam karena tidak ada perlindungan, merasa tidak efektif atau sia-sia untuk mengadukan (paling hanya ditampung, ribet, cari perkara,dll), tidak tahu prosedur untuk membuat pengaduan (apa, kepada siapa, dimana), merasa bukan urusannya (permisif, "lele-lele luweh", masa bodo), atau khawatir dikucilkan oleh lingkungan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Survei Persepsi Anak Muda Terhadap Integritas dan Anti Korupsi Tahun 2017 ”, kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. **Tingkat pemahaman akan integritas** di kalangan anak muda cukup baik, dan pada umumnya mereka mengenali ciri perilaku yang mencerminkan sikap integritas seperti kejujuran, taat pada hukum, dan anti korupsi. Namun disisi lain apabila diperhadapkan pada kondisi situasional mereka cenderung mengkompromikan integritas dan bersikap “abu-abu”.
2. **Nilai dan prinsip integritas**, pada umumnya anak muda mengamini dan mengenali sikap yang mencerminkan integritas dan kejujuran. Namun ketika mereka diperhadapkan dengan pekerjaan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga, cenderung mengkompromikan dan menegosiasikan nilai dan prinsip integritas.
3. **Permisivitas dan integrasi**, pada tataran kognisi, mereka (anak muda) memahami dan mengenali nilai-nilai integritas seperti kejujuran, taat aturan/hukum, dan menolak adanya korupsi. Namun ketika mereka diperhadapkan pada kebutuhan akan pekerjaan dan menolong keluarga dari kesulitan, ada kecenderungan untuk mengkompromikan nilai integritas. Sikap permisif untuk melanggar hukum atau aturan paling banyak jika berkaitan demi menolong keluarganya.
4. Pada umumnya anak muda pernah mengalami atau setidaknya akrab dengan praktek korupsi yang terjadi di lingkungan mereka. Hampir semua aspek seperti pengurusan ijin, fasilitas sekolah, pelayanan kesehatan, tilang oleh polisi, kelancaran usaha, dan suap untuk mendapatkan pekerjaan, merupakan praktek-praktek terjadinya korupsi yang akrab dengan dunia mereka.
5. Komitmen dalam membangun integritas dan anti korupsi. Ada kecenderungan responden kurang begitu optimis terkait peran mereka dalam gerakan anti korupsi. Hal ini nampak bahwa responden yang mau langsung melaporkan atau mengadukan tindak korupsi kurang dari 55

persen. Kecenderungan mereka melakukan pembiaran dengan alasan tidak tahu prosedur dan tidak ada perlindungan, serta merasa tidak ada efeknya jika melakukan pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*. Gramedia. Jakarta.
- Klockars, Carl B., Sanja Kutnjak Ivkovic dan M.R. Haberfeld. 2006. *Enhancing Police Integrity*. Springer, Dordrecht.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995 (Cet. Ke-3). *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES: Jakarta
- Prints, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Purnomo, Daru. 2017 (cet. Ke-3). *Statistik Sosial dan Aplikom*. Satya Wacana University Press: Salatiga
- S.H. Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelasan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES: Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta
- Soesatyo, Bambang. 2011. *Perang-Perangan Melawan Korupsi*. UFUK Press: Jakarta.
- Transparency International Indonesia. 2012 *Survei Integritas Anak Muda Tahun 2012*. Transparency Internasional Jakarta. Jakarta.

Transparency Internasional Indonesia. 2013. *Survei Persepsi dan Sikap Terhadap Integritas dan Anti Korupsi 2013*. Transparency Internasional: Jakarta

